

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

BAPPELITBANGDA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem. Pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja merupakan hal penting yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip – prinsip “*Good Governance*”.

Semoga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan program dan kegiatan di masa mendatang.

Amlapura, 11 Maret 2019
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Karangasem,



Drs. I Made Sujana Erawan

Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198603 1 374

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem merupakan aparat perencana pembangunan yang taktis dan operasional, diposisikan sebagai Institusi untuk melaksanakan penyusunan perencanaan daerah, dalam menentukan kebijakan perencanaan daerah serta penilaian atas hasil-hasil pelaksanaannya di lapangan, wajib memenuhi komponen yang keempat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu pelaporan kinerja sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Karangasem.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Karangasem tahun 2018 adalah Indikator Kinerja utama Bappelitbangda Kabupaten Karangasem dan pencapaiannya sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2018.

C. KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem terdiri dari :

1) Kepala Badan

Kepala Badan memimpin Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3) Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program, Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan

Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program, Penendalian dan Evaluasi Pelaporan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro
- b. Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektifitas
- c. Sub Bidang Data Statistik, Monev Pelaporan

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

4) Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang I : Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Sub Bidang II : Pendidikan , Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
- c. Sub Bidang III : Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Satuan Pol PP

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

5) Bidang Ekonomi Dan SDA

Bidang Ekonomi dan SDA pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang I : Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal Pariwisata
- b. Sub Bidang II : Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM
- c. Sub Bidang III : Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

6) Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 3 (Tiga) Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang I : PU dan Penataan Ruang, Pertanahan
- b. Sub Bidang II : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemadam Kebakaran
- c. Sub Bidang III : Komunikasi dan Informasi, Perhubungan Pemukiman, Pemadam Kebakaran, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

7) Bidang Litbang dan Perencanaan

Bidang Litbang dan Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Sub Bidang Perencanaan
- c. Sub Bidang Penganggaran

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

8) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan disesuaikan dengan kebutuhan.

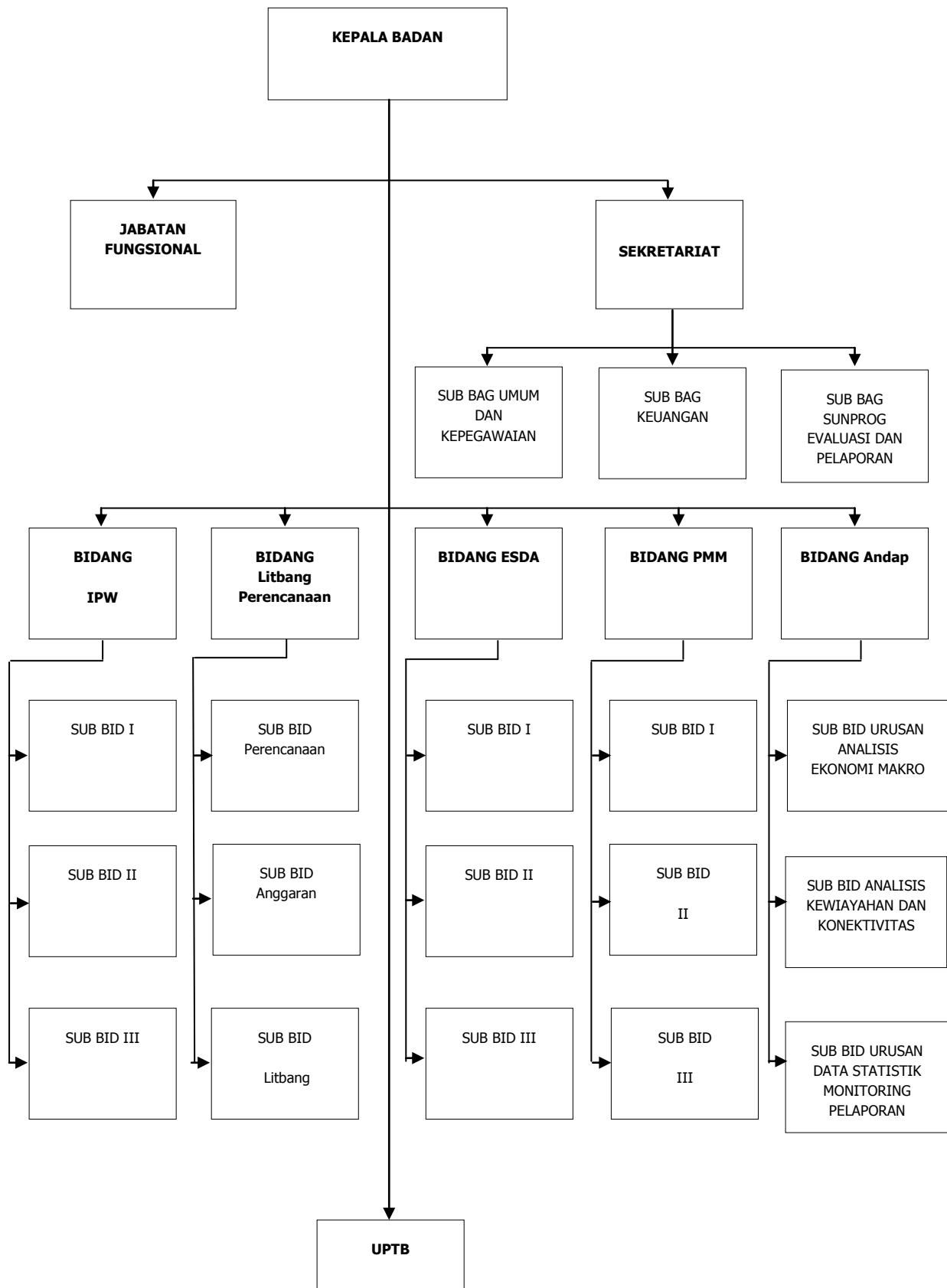
9) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagian tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, dan jumlah tenaga ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana bagan 1.1 di bawah ini :

BAGAN 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM



D. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Peraturan Bupati No 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah
- b) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan daerah
- d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja OPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Dengan adanya analisis atas capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang bermanfaat untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas atau merupakan ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018, serta realisasi anggaran.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 dan langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud, menjadi landasan dan pedoman bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dalam merencanakan pembangunan 5 tahun kedepan (2016 – 2021).

B. Visi Bappelitbangda Kabupaten Karangasem

Visi adalah gambaran kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, yang ingin diwujudkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi perencana pembangunan dan dengan mengacu kepada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka visi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem adalah **"MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS, KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN"**.

Berkualitas mengandung makna bahwa Perencanaan pembangunan daerah disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, bottom up dan top down serta dapat dipertanggungjawabkan; Perencanaan pembangunan daerah mampu menjawab permasalahan dan isu yang berkembang di masyarakat; dan Perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah.

Komperehensif mengandung makna bahwa Perencanaan pembangunan daerah disusun secara menyeluruh/holistik dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders pada seluruh aspek pembangunan.

Komperehensif mengandung makna Hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah dapat diterapkan/diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

C. Misi Bappelitbangda Kabupaten Karangasem

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Misi Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan sebagai pelaksana fungsi manajemen harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh di segala bidang pembangunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dirumuskan sehingga memberikan umpan balik terhadap perencanaan selanjutnya.

Dalam upaya mewujudkan perencanaan yang berkualitas, Bappelitbangda sebagai institusi perencana harus mampu meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan data/informasi, dokumen pembangunan daerah secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Perencanaan pembangunan sebagai pelaksana fungsi manajemen harus mampu mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas demi kepentingan perencanaan pembangunan daerah. Bappelitbangda terus berupaya meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, komprehensif dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Karangasem

Bappelitbangda Kabupaten Karangasem tidak melakukan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Namun demikian kualitas pelayanan Bappelitbangda tercermin dari kualitas perencanaan yang dihasilkan serta ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

D. Tujuan, Sasaran, Target, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program SKPD.

Tujuan, Sasaran, Target, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana terlampir dalam *Lampiran I*

E. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021. Penyusunan Indikator Kinerja Utama, merupakan tindak lanjut atas:

- a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Diamatkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing termasuk Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan setiap awal tahun.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Karangasem bertujuan untuk menetapkan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang disusun dengan mempertimbangkan :

1. RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021
2. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Karangasem
3. Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Karangasem
4. Pemahaman terhadap konsepsi keragaman fungsi organisasi perangkat daerah.

Bappelitbangda Kabupaten Karangasem menetapkan 6 tolak ukur kinerja secara umum dalam pencapaian 3 sasaran strategisnya yaitu :

1. Sasaran strategis : Meningkatnya keselarasan perencanaan, efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah, indikator :
 - a. ***Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah***
 - b. ***Persentase prioritas pembangunan daerah mendukung prioritas provinsi dan nasional***
 - c. ***Persentase Target IKU yang ada di RKA-SKPD***
 - d. ***Persentase capaian target pembangunan daerah***
2. Sasaran Strategis : Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan

Indikator : Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti

- 3. Sasaran Strategis** : Akuntabilitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Karangasem yang optima, indikator : Nilai Evaluasi AKIP Bapelitbangda Kabupaten Karangasem

Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Karangasem secara lebih terinci dapat dilihat pada ***Lampiran II.***

F. Rencana Kinerja Tahunan SKPD

Rencana kinerja Tahunan Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2018 merupakan kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2018 sesuai dengan target kinerja pada Renstra SKPD. Rencana kinerja Tahunan Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2018 secara lebih rinci disajikan pada ***Lampiran III.***

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018, Bappelitbangda Kabupaten Karangasem selain rutin melaksanakan urusan setiap SKPD, juga melaksanakan program dan kegiatan strategis yang merupakan urusan wajib dan pilihan SKPD.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2018 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja seperti yang tercantum dalam ***Lampiran IV.***

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2018, didasarkan kepada evaluasi terhadap Rencana kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018.

Realisasi kinerja atas dasar rencana kinerja tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Karangasem sesuai dengan formulasi melalui target indikator sasaran sebagaimana terlampir pada **Lampiran V**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kabupaten Karangasem tahun 2018 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Karangasem.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Karangasem periode 2016-2021.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbagda Kabupaten Karangasem tahun 2018 ini dibuat dan semoga dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja Bappelitbangda di masa-masa datang.

Amlapura,
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



Drs. I Made Juliana Erawan
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198603 1 374

LAMPIRAN I

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2017-2021

1. Instansi : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas sebagai
2. Visi : Dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
					TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah									
1	Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1. Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
			2. Persentase prioritas pembangunan daerah mendukung prioritas provinsi dan nasional	%	100	100	100	100	100
			3. Persentase Target IKU yang ada di RKA-SKPD	%	100	100	100	100	100

			4. Persentase capaian target pembangunan daerah	%	90	95	95	100	100
Misi 2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah									
2	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
Misi 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Karangasem									
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Karangasem	1. Akuntabilitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Karangasem yang optimal	1. Nilai Evaluasi AKIP Bapelitbangda Kabupaten Karangasem	NILAI	B	B	A	A	A

LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	merupakan rata-rata dari jumlah indikator kesesuaian antara RPJPD dengan RPJMD, RPJMD dengan Renstra, dan RKPD dengan Renja	Perda No 7 /2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 , Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem , Renja SKPD
		Persentase prioritas pembangunan daerah mendukung prioritas provinsi dan nasional	Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan daerah harus mendukung tujuan pembangunan nasional. Merupakan perbandingan jumlah prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas provinsi dan nasional dengan jumlah program prioritas pembangunan daerah	RKPD Kabupaten Karangasem, RKPD Provinsi dan NawaCita

		Persentase Target IKU yang ada di RKA-SKPD	Penerapan UU 25/2004 menuntut setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dengan dukungan penganggaran secara efektif dan efisien. APBD sebagai instrumen penganggaran harus disusun berdasarkan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas APBD diperlukan sinergi antara perencanaan dan penganggaran. Merupakan perbandingan antara jumlah IKU Perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA-SKPD dengan jumlah IKU perangkat daerah	IKU Perangkat Daerah dan RKA-SKPD
		Persentase capaian target pembangunan daerah	Terealisasinya rencana pembangunan daerah merupakan ukuran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah	Perda No 7 /2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021
2	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti	Hasil penelitian dan pengembangan daerah merupakan dasar dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Bappelitbangda Kabupaten Karangasem

3	Akuntabilitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Karangasem yang optimal	Nilai Evaluasi AKIP Bapelitbangda Kabupaten Karangasem	Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban pencapaian target kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten Karangasem
---	--	--	---	--

LAMPIRAN III
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	Program perencanaan pembangunan daerah
		Persentase prioritas pembangunan daerah mendukung prioritas provinsi dan nasional	%	100	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		Persentase Target IKU yang ada di RKA-SKPD	%	100	Program Perencanaan Sosial Budaya
		Persentase capaian target pembangunan daerah	%	95	Program Perencanaan Prasaana Wilayah dan Sumber Daya
2	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti	%	100	Program Pengembangan Data/Informasi

					Program Kerjasama Pembangunan
3	Akuntabilitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Karangasem yang optimal	Nilai Evaluasi AKIP Bapelitbangda Kabupaten Karangasem	NILAI	B	Program pelayanan administrasi perkantoran
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

**LAMPIRAN V
EVALUASI KINERJA**

INSTANSI : **BAPPELITBANGDA KABUPATEN KARANGASEM**
TAHUN : **2018**

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI				Efektifitas program	Tindak lanjut tahun berikutnya
URAIAN	INDIKATOR	2018		URAIAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	TARGET		TARGET	%	KEUANGAN	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Bappelitbangda	Nilai evaluasi AKIP Bappelitbangda Kab. Karangasem	B	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	terpenuhinya jumlah materai yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat	800 lembar	4.200.000,00	800 lembar	100,00	1.398.000,00	33,29	Kegiatan sudah berjalan baik	perlu penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Persentase air, listrik, telepon yang terbayar	36 rekening/ bln	108.000.000,00	36 rekening /bln	100,00	59.581.719,00	55,17	Kegiatan sudah berjalan baik	perlu penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disamsat/ berijin	18 unit	12.000.000,00	18 unit	100,00	9.444.600,00	78,71	Kegiatan sudah berjalan baik	perlu penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan

				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	100%	37.811.600,00	100%	100,00	32.915.800,00	87,05	Kegiatan sudah berjalan baik kebersihan kantor sudah terlaksana	Keiatan ini perlu lebih ditingkatkan lagi
				Penyediaan alat tulis kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	100%	50.813.500,00	100%	100,00	42.919.100,00	84,46	Kegiatan sudah berjalan baik kebutuhan ATK sudah terpenuhi	perlu penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan	100%	9.633.300,00	100%	100,00	9.633.300,00	100,00	Kegiatan sudah berjalan baik	agar lebih ditingkatkan lagi
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	100%	40.000.000,00	100%	100,00	29.105.900,00	72,76	Kegiatan sudah berjalan baik	agar lebih ditingkatkan lagi
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan volume bahan bacaan yang tersedia	10 jenis	24.000.000,00	10 jenis	100,00	19.071.000,00	79,46	Kegiatan sudah berjalan baik	agar lebih ditingkatkan lagi
				Penyediaan makanan dan minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	925 orang	44.355.000,00	925 orang	100,00	35.041.000,00	79,00	Kegiatan sudah berjalan baik	agar lebih ditingkatkan lagi
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 kali	400.000.000,00	15 kali	100,00	247.913.072,00	61,98	Kegiatan sudah berjalan baik	agar lebih diefisienkan lagi

				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Volume tenaga kontrak yang terbayar	408 OB	565.200.000,00	408 OB	100,00	563.950.000,00	99,78	Kegiatan sudah berjalan baik	agar lebih ditingkatkan lagi
				Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan	100%	76.200.000,00	100%	100,00	54.920.000,00	72,07	Kegiatan sudah berjalan baik	agar lebih ditingkatkan lagi
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Frekuensi koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	75 kali	60.797.800,00	75 kali	100,00	44.750.000,00	73,60	Kegiatan sudah berjalan baik	agar lebih diefisienkan lagi
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sepeda Motor	1 unit	20.000.000,00	1 unit	-	-	-	Tidak direalisasikan	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3unit	30.000.000,00	3unit	100,00	15.060.000,00	50,20	Kegiatan sudah berjalan baik	disesuaikan dengan kebutuhan
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jmlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 unit	221.091.300,00	18 unit	100,00	157.700.290,00	71,33	Kegiatan sudah berjalan baik	disesuaikan dengan kebutuhan
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	35.000.000,00	100%	100,00	15.210.250,00	43,46	Kegiatan sudah berjalan baik	perlu penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
				Penataan dan pengelolaan arsip	Persentase arsip/ dokumen yang dikelola dan dipelihara	100%	54.917.000,00	100%	100,00	36.788.000,00	66,99	Kegiatan sudah berjalan baik	disesuaikan dengan kebutuhan

			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan(LKJIP dan LKPJ/LPPD dan Laporan Keuangan) yang tersusun dan disampaikan tepat waktu	70 buku	42.226.000,00	70 buku	100,00	39.116.900,00	92,64	Kegiatan sudah berjalan baik	perlu penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Frekuensi perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	2 kali	70.000.000,00	2 kali	100,00	31.607.200,00	45,15	Kegiatan sudah berjalan baik	disesuaikan dengan kebutuhan
Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti	100%	Program Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah buku data pokok pembangunan, Buku Kaangasem membangun, buku saku,	250 buku	144.545.000,00	250 buku	100,00	116.015.150,00	80,26	Kegiatan sudah berjalan baik	agar pengumpulanda ta dan informasi lebih ditingkatkan lagi
				Penyusunan Profil Daerah	Jumlah buku Profil Daerah dan buku SIPD yang tersusun	135 buku	88.500.000,00	135 buku	100,00	79.160.220,00	89,45	Kegiatan sudah berjalan baik	perlu penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
				Monitoring dan evaluasi program CBD	Jumlah laporan hasil monitoring CBD yang tersusun	30 buku	150.978.000,00	30 buku	100,00	148.066.000,00	98,07	Kegiatan sudah berjalan baik	agar monitoring dan evaluasi lebih ditingkatkan

				Pengembangan Program Sistem Perencanaan	Workshop SIMDA Perencanaan	50 OPD	143.612.600,00	50 OPD	100,00	35.776.750,00	24,91	Kegiatan sudah berjalan baik	agar terlaksananya simda perencanaan
Meningkatkan keselarasan perencanaan dan efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	Program Kerjasama Pembangunan	Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek	Jumlah proposal lomba ristek dan dokumen kajian penguatan pengelolaan manajemen desa inovatif	20 buku	164.225.000,00	20 buku	100,00	161.352.500,00	98,25	Kegiatan sudah berjalan baik	agar lebih merangsang untuk peningkatan inovasi masyarakat
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah hasil musrenbang yang tersusun	480 buku	275.959.900,00	480 buku	100,00	256.856.900,00	93,08	Kegiatan sudah berjalan baik	agar peserta musrenbang lebih ditingkatkan agar tercapainya perencanaan yang lebih baik
	Persentase prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas provinsi dan nasional	100%		Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	100 buku	23.204.000,00	100 buku	100,00	22.345.150,00	96,30	Kegiatan sudah berjalan baik	agar penetapan RKPD bisa tepat waktu
	Persentase target IKU yang ada di RKA- SKPD	100%		Penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS	Jumlah buku KUA dan PPAS	600 Buku	137.154.000,00	600 buku	100,00	118.207.450,00	86,19	Kegiatan sudah berjalan baik	agar penetapan KUA dan PPAS tepat waktu
	Persentase capaian target pembangunan	95%		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	Frekuensi koordinasi dengan teppra provinsi dan pusat	12 bulan	71.712.600,00	12 bulan	100,00	50.970.611,00	71,08	Kegiatan sudah berjalan baik	koordinasi terkait LAKIP bisa lebih ditingkatkan

	n daerah			Daerah									
				Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan hasil evaluasi TA 2018, laporan hasil evaluasi dan monitoring, bukuevaluasi tw I,II dan III	120 buku	166.757.950,00	120 buku	100,00	123.245.210,00	73,91	Kegiatan sudah berjalan baik	monitoring dan evaluasi lebih ditingkatkan lagi
				Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah laporan akhir DAK, Jumlah buku laporan DAK TWI,II & III, Frekuensi rapat DAK	40 buku, 42 buku, 3 kali	88.447.700,00	40 buku, 42 buku, 3 kali	100,00	79.887.210,00	90,32	Kegiatan sudah berjalan baik	koordinasi dan evaluasi DAK lebih ditingkatkan lagi
				Pengkajian dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem	Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan kabupaten Karangasem	12 bulan	195.740.000,00	12 bulan	100,00	193.984.900,00	99,10	Kegiatan sudah berjalan baik	pengkajian dan evaluasi pembangunan ditingkatkan lagi
				Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem	Dokumen evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem	60 buku	144.985.000,00	60 buku	100,00	137.156.600,00	94,60	Kegiatan sudah berjalan baik	Hasil evaluasi hendaknya bisa dipakai untuk acuan perubahan RPJMD
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian dalam arti luas	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi program pertanian dalam arti luas	20 buku	37.501.000,00	20 buku	100,00	34.357.500,00	91,62	Kegiatan sudah berjalan baik	lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi pembangunan di sektor pertanian

				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karangasem	Jumlah buku hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif yang tersusun	25 buku	67.883.500,00	25 buku	100,00	60.182.230,00	88,66	Kegiatan sudah berjalan baik	lebih meningkatkan koordinasi pembangunan ekonomi kreatif
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah buku ekonomi makro daerah yang tersusun	100 buku	42.135.000,00	100 buku	100,00	34.909.300,00	82,85	Kegiatan sudah berjalan baik	kwalitas penyusunan indikator ekonomi daerah agar lebih ditingkatkan
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Jumlah laporan hasil koordinasi monitoring dan evaluasi dampak pembangunan terhadap sumber daya alam	15 buku	61.726.500,00	15 buku	100,00	57.445.500,00	93,06	Kegiatan sudah berjalan baik	agar koordinasi lebih ditingkatkan lagi
			Progam Perencanaan Sosial Budaya	Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip	Jumlah cetak buku hasil perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip daerah	15 buku	58.224.000,00	15 buku	100,00	55.547.800,00	95,40	Kegiatan sudah berjalan baik	agar kordinasi dibidang pendidikan lebih ditingkatkan

				Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB	Jumlah buku hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB, Pembangunan berkelanjutan (SDGs)	20 buku	52.019.000,00	20 buku	100,00	49.226.200,00	94,63	Kegiatan sudah berjalan baik	agar kordinasi dibidang kesehatan lebih ditingkatkan
				Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	Jumlah buku LP2KD dan rapat koordinasi kemiskinan	30 buku	118.873.000,00	30 buku	100,00	112.203.970,00	94,39	Kegiatan sudah berjalan baik	agar TKPK lebih dikuatkan lagi
				Koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan masyarakat desa dan satuan Pol PP	Jumlah buku laporan koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan masyarakat desa dan satuan Pol PP	60 buku	59.292.450,00	60 buku	100,00	56.543.550,00	95,36	Kegiatan sudah berjalan baik	agar koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja lebih ditingkatkan lagi

				Kajian model pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan daerah berbasis partisipatif	Jumlah kajian model pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan daerah berbasis partisipatif yang tersusun	25 buku	135.181.000,00	25 buku	100,00	113.212.050,00	83,75	Kegiatan sudah berjalan baik	agar bisa membantu menanggulangi kemiskinan
			Program Perencanaan Prasaana Wilayah dan Sumber Daya	Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah PU dan tata ruang dan pertanahan	Dokumen RPIJM, Laporan akhir monitoring dan evaluasi	10 buku, 25 buku	180.966.000,00	10 buku, 25 buku	100,00	165.298.495,00	91,34	Kegiatan sudah berjalan baik	untuk lebih meningkatkan koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah PU dan tata ruang dan pertanahan
				Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah perumahan pemukiman dan pemadam kebakaran	Laporan Monitoring dan evaluasi dan buku MPS	25 buku, 25 buku	163.894.300,00	25 buku, 25 buku	100,00	141.878.576,00	86,57	Kegiatan sudah berjalan baik	Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah perumahan pemukiman dan pemadam kebakaran agar lebih ditingkatkan lagi
				Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah komunikasi dan informasi, perhubungan	Laporan Monitoring dan evaluasi infrastruktur pengembangan wilayah komunikasi dan informasi perhubungan	30 buku	99.569.000,00	30 buku	100,00	78.124.500,00	78,46	Kegiatan sudah berjalan baik	Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah komunikasi dan informasi, perhubungan agar lebih

													ditingkatkan lagi
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rencana Aksi Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Frekuensi pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 bulan	42.015.000,00	12 bulan	100,00	32.526.950,00	77,42	Kegiatan sudah berjalan baik	agar pelaksanaan rencana aksi lebih ditingkatkan lagi
JUMLAH							4.821.347.000,00			3.960.607.403,00	82,15		

LAMPIRAN V
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Bappelitbangda Kab Karangasem
 Tahun Anggaran : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3			
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
		Persentase prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas provinsi dan nasional	100%	100%	100%
		Persentase Target IKU yang ada di RKA- SKPD	100%	100%	100%
		Persentase target pembangunan daerah	95%	95%	100%

2	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Akutabilitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Karangasem yang optimal	Nilai evaluasi AKIP Bappelitbangda Kabupaten Karangasem	B	B	B

**LAMPIRAN V
CAPAIAN KINERJA**

INSTANSI : **BAPPELITBANGDA KABUPATEN KARANGASEM**
TAHUN : **2018**

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI			
URAIAN	INDIKATOR	2018		URAIAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	TARGET		TARGET	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Bappelitbangda	Nilai evaluasi AKIP Bappelitbangda Kab. Karangasem	B	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	terpenuhinya jumlah materai yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat	800 lembar	4.200.000,00	800 lembar	100,00	1.398.000,00	33,29
				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Persentase air, listrik, telepon yang terbayar	36 rekening/bln	108.000.000,00	36 rekening/bln	100,00	59.581.719,00	55,17
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat/berijin	18 unit	12.000.000,00	18 unit	100,00	9.444.600,00	78,71
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	100%	37.811.600,00	100%	100,00	32.915.800,00	87,05

				Penyediaan alat tulis kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	100%	50.813.500,00	100%	100,00	42.919.100,00	84,46
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan	100%	9.633.300,00	100%	100,00	9.633.300,00	100,00
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	100%	40.000.000,00	100%	100,00	29.105.900,00	72,76
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan volume bahan bacaan yang tersedia	10 jenis	24.000.000,00	10 jenis	100,00	19.071.000,00	79,46
				Penyediaan makanan dan minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	925 orang	44.355.000,00	925 orang	100,00	35.041.000,00	79,00
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 kali	400.000.000,00	15 kali	100,00	247.913.072,00	61,98
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Volume tenaga kontrak yang terbayar	408 OB	565.200.000,00	408 OB	100,00	563.950.000,00	99,78

				Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan	100%	76.200.000,00	100%	100,00	54.920.000,00	72,07
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Frekuensi koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	75 kali	60.797.800,00	75 kali	100,00	44.750.000,00	73,60
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Sepeda Motor	1 unit	20.000.000,00	1 unit		-	-
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3unit	30.000.000,00	3unit	100,00	15.060.000,00	50,20
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jmlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	18 unit	221.091.300,00	18 unit	100,00	157.700.290,00	71,33
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	35.000.000,00	100%	100,00	15.210.250,00	43,46
				Penataan dan pengelolaan arsip	Persentase arsip/ dokumen yang dikelo dan dipelihara	100%	54.917.000,00	100%		36.788.000,00	66,99

			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan(LKJIP dan LKPJ/LPPD dan Laporan Keuangan) yang tersusun dan disampaikan tepat waktu	70 buku	42.226.000,00	70 buku	100,00	39.116.900,00	92,64
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Frekuensi perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	2 kali	70.000.000,00	2 kali	100,00	31.607.200,00	45,15
Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti	100%	Program Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah buku data pokok pembangunan, Buku Kaangasem membangun, buku saku,	250 buku	144.545.000,00	250 buku	100,00	116.015.150,00	80,26
				Penyusunan Profil Daerah	Jumlah buku Profil Daerah dan buku SIPD yang tersusun	135 buku	88.500.000,00	135 buku	100,00	79.160.220,00	89,45
				Monitoring dan evaluasi program CBD	Jumlah laporan hasil monitoring CBD yang tersusun	30 buku	150.978.000,00	30 buku	100,00	148.066.000,00	98,07
				Pengembangan Program Sistem Perencanaan	Workshop SIMDA Perencanaan	50 OPD	143.612.600,00	50 OPD	100,00	35.776.750,00	24,91

Meningkatkan keselarasan perencanaan dan efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	Program Kerjasama Pembangunan	Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek	Jumlah proposal lomba ristek dan dokumen kajian penguatan pengelolaan manajemen desa inovatif	20 buku	164.225.000,00	20 buku	100,00	161.352.500,00	98,25
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah hasil musrenbang yang tersusun	480 buku	275.959.900,00	480 buku	100,00	256.856.900,00	93,08
	Persentase prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas provinsi dan nasional	100%		Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	100 buku	23.204.000,00	100 buku	100,00	22.345.150,00	96,30
	Persentase target IKU yang ada di RKA-SKPD	100%		Penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS	Jumlah buku KUA dan PPAS	600 Buku	137.154.000,00	600 buku	100,00	118.207.450,00	86,19
	Persentase capaian target pembangunan daerah	95%		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Frekuensi koordinasi dengan tepra provinsi dan pusat	12 bulan	71.712.600,00	12 bulan	100,00	50.970.611,00	71,08
				Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan hasil evaluasi TA 2018, laporan hasil evaluasi dan monitoring, bukuevaluasi tw I,II dan III	120 buku	166.757.950,00	120 buku	100,00	123.245.210,00	73,91

				Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah laporan akhir DAK, Jumlah buku laporan DAK TWI,II & III, Frekuensi rapat DAK	40 buku, 42 buku, 3 kali	88.447.700,00	40 buku, 42 buku, 3 kali	100,00	79.887.210,00	90,32
				Pengkajian dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem	Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan kabupaten Karangasem	12 bulan	195.740.000,00	12 bulan	100,00	193.984.900,00	99,10
				Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem	Dokumen evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem	60 buku	144.985.000,00	60 buku		137.156.600,00	94,60
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian dalam arti luas	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi program pertanian dalam arti luas	20 buku	37.501.000,00	20 buku	100,00	34.357.500,00	91,62
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karangasem	Jumlah buku hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif yang tersusun	25 buku	67.883.500,00	25 buku	100,00	60.182.230,00	88,66
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah buku ekonomi makro daerah yang tersusun	100 buku	42.135.000,00	100 buku	100,00	34.909.300,00	82,85

				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Jumlah laporan hasil koordinasi monitoring dan evaluasi dampak pembangunan terhadap sumber daya alam	15 buku	61.726.500,00	15 buku		57.445.500,00	93,06
			Progam Perencanaan Sosial Budaya	Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip	Jumlah cetak buku hasil perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip daerah	15 buku	58.224.000,00	15 buku	100,00	55.547.800,00	95,40
				Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB	Jumlah buku hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB, Pembangunan berkelanjutan (SDGs)	20 buku	52.019.000,00	20 buku	100,00	49.226.200,00	94,63
				Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	Jumlah buku LP2KD dan rapat koordinasi kemiskinan	30 buku	118.873.000,00	30 buku	100,00	112.203.970,00	94,39

				Koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan masyarakat desa dan satuan Pol PP	Jumlah buku laporan koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan masyarakat desa dan satuan Pol PP	60 buku	59.292.450,00	60 buku	100,00	56.543.550,00	95,36
				Kajian model pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan daerah berbasis partisipatif	Jumlah kajian model pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan daerah berbasis partisipatif yang tersusun	25 buku	135.181.000,00	25 buku		113.212.050,00	83,75
			Program Perencanaan Prasaana Wilayah dan Sumber Daya	Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah PU dan tata ruang dan pertanahan	Dokumen RPIJM, Laporan akhir monitoring dan evaluasi	10 buku, 25 buku	180.966.000,00	10 buku, 25 buku	100,00	165.298.495,00	91,34
				Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah perumahan pemukiman dan pemadam kebakaran	Laporan Monitoring dan evaluasi dan buku MPS	25 buku, 25 buku	163.894.300,00	25 buku, 25 buku	100,00	141.878.576,00	86,57
				Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah komunikasi dan informasi, perhubungan	Laporan Monitoring dan evaluasi infrastruktur pengembangan wilayah komunikasi dan informasi perhubungan	30 buku	99.569.000,00	30 buku	100,00	78.124.500,00	78,46

			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rencana Aksi Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Frekuensi pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 bulan	42.015.000,00	12 bulan	100,00	32.526.950,00	77,42	
JUMLAH								4.821.347.000,00			3.960.607.403,00	82,15